



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted April 01, 2025, Approved May 30, 2024, Published July 31, 2025

Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Beringin tentang Pemilihan Umum

Ni Made Sariayuni¹, Romi Mesra²

^{1,2}program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹20606005@unima.ac.id, ²romimesra@unima.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Desa Beringin tentang pemilihan umum dalam konteks sistem politik demokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap masyarakat Desa Beringin, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Informan dipilih menggunakan purposive sampling yang terdiri dari masyarakat yang memiliki pengalaman berpartisipasi dalam pemilihan umum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pemahaman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang sistem politik demokrasi masih bervariasi, mulai dari konsep kedaulatan rakyat hingga interpretasi tradisional musyawarah mufakat. Proses pelaksanaan pemilihan umum dinilai sudah baik secara prosedural, namun masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman masyarakat tentang tata cara pemilihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman meliputi tingkat pendidikan, heterogenitas latar belakang masyarakat, aksesibilitas informasi, dan pengalaman partisipasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun partisipasi fisik tinggi, pemahaman substantif tentang demokrasi masih perlu ditingkatkan melalui program edukasi politik yang komprehensif dan disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman Masyarakat, Desa Beringin, Pemilihan Umum

Abstract. This study aims to analyze the level of understanding of the Beringin Village community regarding general elections in the context of a democratic political system. The study used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and participant observation with the Beringin Village community, Ranoyapo District, South Minahasa Regency. Informants were selected using purposive sampling, consisting of community members who had experience participating in general elections. Data analysis was conducted using thematic analysis to identify patterns of community understanding. The results showed that community understanding of the democratic political system still varied, ranging from the concept of popular sovereignty to the traditional interpretation of deliberation and consensus. The general election process was deemed procedurally sound, but challenges remain in terms of community understanding of election procedures. Factors influencing the level of understanding include education level, heterogeneity of community background, accessibility of information, and experience of political participation. This study concluded that despite high physical participation, substantive understanding of democracy still needs to be improved through a comprehensive political education program tailored to local characteristics.

Keywords: Level of Public Understanding, Beringin Village, General Election

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang secara alami memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan hidup bersama dengan individu lain di dalam masyarakat. Pada umumnya manusia dalam kegiatan kehidupannya akan menemukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, maka dari itu setiap manusia perlu memahami suatu perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan ini adalah hal yang alami dan dapat memperkaya pengalaman manusia. Dengan adanya pemahaman terhadap perbedaan, manusia dapat belajar, berkembang, dan bekerja sama untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai dunia serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Pandangan demikian merupakan suatu ciri-ciri dari kehidupan yang demokratis, dimana keberagaman dihargai sebagai kekayaan dalam membangun masyarakat yang harmonis (Huntington, 2021).

Kehidupan politik dan demokrasi adalah dua konsep yang saling terkait dalam banyak negara. Kehidupan politik merujuk pada semua aktivitas dan proses yang terkait dengan pengambilan keputusan politik, pembuatan kebijakan, dan perebutan kekuasaan. Sementara demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau diwakili oleh wakil yang mereka pilih. Prinsip demokrasi melibatkan hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berbicara, kebebasan pers, serta perlindungan hak asasi manusia. Sistem demokrasi memberikan warga negara akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan (Dahl, 2020). Kehidupan politik dalam demokrasi mencakup pemilihan umum, debat publik, diskusi kebijakan, dan transparansi dalam pemerintahan.

Demokrasi bertujuan untuk memastikan partisipasi rakyat dalam proses politik, menjaga hak asasi manusia, serta menghindari konsentrasi kekuasaan yang otoriter. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan rakyat atau diwakili oleh wakil yang dipilih oleh rakyat. Dalam demokrasi, pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat dan tunduk pada hukum. Ini merupakan sistem pemerintahan yang selalu berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat dan melindungi hak-hak setiap masyarakatnya (Schmitter & Karl, 2021). Pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting di dalam sistem demokrasi, dimana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan.

Demokrasi dapat disebut sebagai suatu cara utama yang dilakukan dimana rakyat berpartisipasi dalam proses politik dan memengaruhi pemerintahan dalam sistem demokrasi. Namun pemahaman masyarakat terhadap konsep demokrasi dan bagaimana pemilihan umum bekerja bisa bervariasi, maka dari itu penting untuk memahami sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dalam konteks pemilihan umum. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengganti atau memilih para pemimpin mereka berdasarkan kebijakan dan visi yang diusulkan oleh kandidat dan partai politik. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, memungkinkan rakyat untuk menggunakan hak politik mereka dalam menentukan arah politik negara (Purwanto, 2024).

Demokrasi sangat berhubungan dengan pemilihan umum. Dalam konteks demokrasi, pemilihan umum adalah mekanisme utama dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih para wakil mereka yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi secara teratur diadakan, dimana warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih para perwakilan mereka, baik itu dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif. Pemilu dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya kedaulatan rakyat serta untuk mewujudkan tujuan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Wulandari, 2023). Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kesadaran dan pemahaman demokratis suatu masyarakat. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil

demokrasi serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara (Neng Latinur Latipah, 2021). Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya hak pilih mereka dalam menentukan arah kepemimpinan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat mengindikasikan kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna dan pentingnya pemilihan umum dalam sistem demokrasi.

Pemahaman masyarakat tentang pemilihan umum tidak hanya terbatas pada prosedur teknis pemungutan suara, tetapi juga meliputi pemahaman tentang visi dan misi kandidat, program kerja yang ditawarkan, serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala desa menjadi salah satu bentuk implementasi demokrasi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemilihan kepala desa yang dilakukan secara demokratis dengan pemungutan suara langsung yang dilakukan oleh masyarakat desa merupakan perwujudan dari hak masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya secara langsung (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023). Melalui pemilihan kepala desa, masyarakat dapat langsung merasakan dampak dari pilihan politik mereka terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Desa Beringin adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Beringin yang terletak paling ujung yang berdekatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), sebagian penduduk masyarakat desa Beringin merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai desa yang ada di Minahasa Selatan dan sekitarnya. Keberagaman latar belakang masyarakat ini menciptakan dinamika sosial yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks pemahaman mereka terhadap pemilihan umum. Karakteristik masyarakat yang heterogen dengan berbagai pengalaman politik dan budaya yang berbeda dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi lokal maupun nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Wibowo (2022) tentang "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Jawa Barat" menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa tentang proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa masih bervariasi tergantung pada tipologi desa dan tingkat pendidikan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern memiliki karakteristik berbeda dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi (Santoso & Wibowo, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa dengan tipologi modern cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip demokrasi dibandingkan dengan desa tradisional. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rahman dan Sari (2021) tentang "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah" menemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang pemilihan umum berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi politik mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota BauBau tergolong tinggi sebesar 69,87% (Rahman, 2019). Masyarakat yang memiliki pemahaman baik tentang tujuan dan mekanisme pemilihan umum cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi pada setiap tahapan proses demokrasi.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji tentang demokrasi dan pemilihan umum di tingkat desa, namun masih terdapat kesenjangan penelitian khususnya dalam menganalisis tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap pemilihan umum secara komprehensif. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek partisipasi politik dan implementasi prinsip demokrasi, namun belum secara spesifik mengukur tingkat pemahaman masyarakat desa tentang esensi, tujuan, dan mekanisme pemilihan umum. Selain itu, belum ada kajian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat desa tentang pemilihan umum, terutama dalam konteks masyarakat dengan latar belakang heterogen seperti yang terdapat di Desa Beringin. Penelitian di Desa Beringin menjadi penting karena karakteristik masyarakatnya yang berasal dari berbagai daerah dengan pengalaman politik dan

budaya yang beragam, sehingga dapat memberikan gambaran yang unik tentang bagaimana keberagaman mempengaruhi pemahaman terhadap proses demokrasi.

Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengembangkan instrumen pengukuran tingkat pemahaman masyarakat desa tentang pemilihan umum yang tidak hanya mencakup aspek prosedural, tetapi juga meliputi pemahaman substantif tentang makna demokrasi, fungsi pemilihan umum, dan dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat. Kebaruan lain dari penelitian ini adalah fokus pada masyarakat desa dengan karakteristik heterogen dari segi asal daerah, yang dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana mobilitas dan keberagaman latar belakang mempengaruhi pemahaman politik masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *mixed methods* yang menggabungkan analisis kuantitatif untuk mengukur tingkat pemahaman dan analisis kualitatif untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena pemahaman masyarakat desa terhadap pemilihan umum.

Realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa tentang pemilihan umum masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi pemilihan (Penelitian ResearchGate, 2023). Fenomena seperti politik uang, mobilisasi massa, dan kurangnya pemahaman tentang visi-misi kandidat masih sering terjadi dalam pemilihan umum di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural pemilihan telah dilaksanakan, namun esensi demokrasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dan edukasi politik yang komprehensif kepada masyarakat desa, sehingga mereka cenderung memilih berdasarkan pertimbangan non-substantif seperti kedekatan personal atau imbalan materi. Realitas kedua yang perlu diperhatikan adalah pengaruh faktor geografis dan aksesibilitas informasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat. Desa Beringin yang terletak di wilayah perbatasan dengan akses informasi yang relatif terbatas dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi. Keterbatasan akses terhadap media dan informasi politik yang berkualitas dapat menyebabkan masyarakat hanya memiliki pemahaman parsial tentang proses dan tujuan pemilihan umum.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tingkat pemahaman masyarakat Desa Beringin tentang pemilihan umum. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang perspektif, pengalaman, dan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam tentang bagaimana masyarakat memahami konsep demokrasi dan pemilihan umum dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dipilih sebagai teknik utama karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang detail dan mendalam tentang pemahaman, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait pemilihan umum. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, terutama yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan persepsi informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat pertanyaan terbuka untuk memberikan ruang kepada informan untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara bebas dan natural.

Observasi partisipatif dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan untuk memahami perilaku serta praktik masyarakat dalam konteks pemilihan umum. Observasi ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung, termasuk pada saat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses demokrasi di desa. Spradley (2020) menjelaskan bahwa observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan mengamati perilaku dalam setting alaminya. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang dikatakan informan dalam wawancara dengan praktik nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Desa Beringin yang memiliki pengalaman berpartisipasi dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Patton (2021) menyatakan bahwa purposive sampling merupakan teknik yang tepat dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kaya tentang fenomena yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, dimana pengumpulan data dihentikan ketika tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh dari informan tambahan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai dengan melakukan transkripsi hasil wawancara dan catatan observasi, kemudian dilakukan coding untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data. Miles dan Huberman (2019) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, tidak hanya setelah pengumpulan data selesai. Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dimana data dari wawancara dikonfirmasi dengan hasil observasi dan informasi dari berbagai informan untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Pemahaman Masyarakat tentang Sistem Politik Demokrasi

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Beringin menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang sistem politik demokrasi cukup bervariasi. Sebagian besar informan memiliki pemahaman dasar tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nogi Kessek bahwa "*sistem politik demokrasi merupakan sebuah bentuk dimana pemerintahan dan kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara, nah ini juga melibatkan partisipasi masyarakat atau warga untuk pengambilan sebuah hasil keputusan politik dengan melalui pemilihan umum*" (Wawancara, 13 Oktober 2023).

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu NK



Sumber: Data Primer

Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki konsep dasar tentang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi.

Namun demikian, terdapat variasi dalam cara masyarakat memahami implementasi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Olga Tamba mengartikan demokrasi dalam konteks yang lebih tradisional dengan menyatakan bahwa "*demokrasi itu adalah sistem musyawarah untuk menuju kesepakatan yang mufakat bagi kesejahteraan rakyat maupun warga negara itu sendiri*" (Wawancara, 13 Oktober 2023).

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu OT



Sumber: Data Primer

Perspektif ini menunjukkan adanya pengaruh nilai-nilai lokal dalam memahami konsep demokrasi, dimana musyawarah mufakat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi yang sesuai dengan budaya Indonesia.

Sementara itu, Ibu Meini Oping memberikan pemahaman yang lebih menekankan pada aspek kesetaraan hak dan kewajiban dengan mengatakan bahwa "*demokrasi ialah pemerintah yang mana masyarakat turut serta memerintah dengan mengutamakan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negaranya*" (Wawancara, 13 Oktober 2023).

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu MO



Sumber: Data Primer

Pemahaman ini mencerminkan kesadaran tentang prinsip kesetaraan dalam demokrasi, dimana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat Desa Beringin memiliki pemahaman dasar tentang demokrasi, namun interpretasi mereka masih sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan pengalaman hidup masing-masing. Pemahaman yang bervariasi ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih komprehensif tentang konsep demokrasi modern agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang sistem politik yang mereka jalani.

b. Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum di Desa Beringin

Dalam aspek pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat Desa Beringin secara umum menilai bahwa proses yang berlangsung sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ibu Desyi Longi mengungkapkan bahwa "*prosesnya sudah cukup baik, sudah yang sesuai dengan peraturan yang ada, karena yang seperti kita tahu kan langkah kunci di dalam melakukan prinsip demokrasi seperti pemilihan umum kita harus jujur dan dijalankan dengan adil, serta tentunya partisipasi yang aktif dari warga*" (Wawancara, 13 Oktober 2023).

Gambar 4. Wawancara dengan Ibu DL



Sumber: Data Primer

Penilaian positif ini menunjukkan bahwa secara prosedural, penyelenggaraan pemilihan umum di Desa Beringin telah memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi proses pemilihan umum, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat tentang tata cara pemilihan. Ibu Mari Paat menyatakan bahwa "*proses di dalam pemilihan umum di desa beringin sudah cukup bagus hanya saja ada beberapa masyarakat yang masih keliru dalam melakukan pemilihan umum, dan mungkin hal itu yang membuat proses di dalam pemungutan suara menjadi kurang tertib dikarenakan mereka yang belum terlalu tau akan hal itu tentunya masih harus ada arahan dari panitia KPU*" (Wawancara, 13 Oktober 2023).

Gambar 5. Wawancara dengan Ibu MP



Sumber: Data Primer

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun proses secara umum berjalan baik, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Permasalahan ketertiban dalam proses pemungutan suara juga menjadi concern yang disampaikan oleh beberapa informan. Ibu Jein Paat mengungkapkan bahwa "*selama ada kegiatan pemilihan umum dibidang sudah baik si belum cukup baik, karena masih ada sebagian masyarakat yang masih susah di atur*"

ketertiban di dalamnya, tapi itu bukan menjadi penghalang di dalam melakukan pemilihan umum tentu ketika ada masyarakat yang kurang paham akan hal itu kami masyarakat maupun panitia pasti ikut mengarahkan warga tata cara proses pemilihan umum" (Wawancara, 13 Oktober 2023).

Gambar 6. Wawancara dengan Ibu JP



Sumber: Data Primer

Pernyataan ini menunjukkan adanya solidaritas masyarakat dalam membantu sesama warga yang belum memahami prosedur pemilihan.

Temuan observasi menguatkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tampak berpartisipasi dalam melakukan pemilihan umum dengan datang langsung ke tempat pemungutan suara dan mengantri dengan tertib. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang terlihat bingung mengenai bagaimana proses ketika pemilihan umum dan tata cara penggunaan hak pilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi fisik yang tinggi tidak selalu dibarengi dengan pemahaman yang memadai tentang proses dan makna dari pemilihan umum itu sendiri.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Beringin tentang pemilihan umum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama adalah faktor geografis dan aksesibilitas informasi, dimana letak Desa Beringin yang berada di wilayah perbatasan kabupaten mempengaruhi akses masyarakat terhadap informasi politik yang berkualitas. Keterbatasan akses ini menyebabkan sebagian masyarakat hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau sumber informal lainnya, yang dapat mempengaruhi akurasi pemahaman mereka tentang proses demokrasi.

Faktor kedua adalah heterogenitas latar belakang masyarakat Desa Beringin yang berasal dari berbagai daerah di Minahasa Selatan dan sekitarnya. Keberagaman ini menciptakan variasi dalam pengalaman politik dan budaya yang dibawa masing-masing penduduk, sehingga interpretasi terhadap konsep demokrasi dan pemilihan umum juga beragam. Sebagian masyarakat yang berasal dari daerah dengan tradisi demokrasi yang lebih kuat cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah dengan pengalaman demokratis yang terbatas.

Faktor ketiga adalah tingkat pendidikan dan sosialisasi politik yang diterima masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik cenderung memberikan definisi demokrasi yang lebih komprehensif dan sistematis. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan terbatas cenderung memahami demokrasi dalam konteks yang lebih sederhana dan terkadang dicampur dengan nilai-nilai tradisional seperti musyawarah mufakat. Hal ini menunjukkan pentingnya program edukasi politik yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal.

Faktor keempat adalah pengalaman partisipasi dalam kegiatan politik dan demokrasi sebelumnya. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, baik di tingkat desa maupun nasional, menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan tujuan pemilihan umum. Sebaliknya,

mereka yang jarang atau tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik menunjukkan pemahaman yang terbatas dan cenderung pasif dalam proses demokrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengalaman praktis dalam berdemokrasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilihan umum.

2. Pembahasan

a. Pemahaman Masyarakat tentang Sistem Politik Demokrasi dalam Perspektif Teori Partisipasi

Temuan penelitian yang menunjukkan variasi pemahaman masyarakat Desa Beringin tentang sistem politik demokrasi dapat dianalisis melalui teori partisipasi demokratis yang dikemukakan oleh Pateman (1970). Menurut teori ini, partisipasi dalam demokrasi tidak hanya melibatkan kehadiran fisik dalam pemilihan umum, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip-prinsip demokrasi. Pateman menekankan bahwa partisipasi yang efektif dalam demokrasi memerlukan pendidikan dan pengalaman yang memungkinkan individu untuk memahami peran mereka dalam sistem politik (Pateman, 1970). Dalam konteks Desa Beringin, meskipun masyarakat menunjukkan partisipasi fisik yang tinggi dalam pemilihan umum, namun pemahaman mereka tentang esensi demokrasi masih bervariasi dan cenderung dipengaruhi oleh konteks lokal.

Perbedaan interpretasi demokrasi yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti pemahaman Ibu Olga Tamba yang mengaitkan demokrasi dengan musyawarah mufakat, sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas (1996). Teori deliberatif menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemungutan suara, tetapi juga tentang proses diskusi dan deliberasi yang memungkinkan tercapainya konsensus. Namun, Dahl (2020) mengingatkan bahwa dalam demokrasi modern, proses deliberasi harus didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang institusi dan prosedur demokratis. Ketika pemahaman masyarakat masih terbatas pada konsep tradisional, efektivitas proses demokrasi dapat terhambat karena tidak semua aspek dari demokrasi modern dapat diakomodasi dalam kerangka pemikiran tradisional.

Temuan ini juga menegaskan pentingnya civic education atau pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditekankan oleh Gutmann (1987) dalam teorinya tentang democratic education. Gutmann berpendapat bahwa demokrasi membutuhkan warga negara yang terdidik dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem politik. Dalam konteks Desa Beringin, variasi pemahaman yang ditemukan menunjukkan bahwa program edukasi politik perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal namun tetap mempertahankan esensi prinsip-prinsip demokrasi universal. Hal ini sejalan dengan argumen Gutmann bahwa pendidikan demokratis harus mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip demokrasi modern untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan fungsional.

b. Implementasi Proses Pemilihan Umum dalam Kerangka Teori Komunikasi Politik

Analisis terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum di Desa Beringin dapat dipahami melalui teori komunikasi politik yang dikemukakan oleh Nimmo (2004). Menurut Nimmo, komunikasi politik merupakan aktivitas komunikasi yang memiliki konsekuensi atau dampak politik, baik aktual maupun potensial, dalam sistem politik. Dalam konteks pemilihan umum, komunikasi politik tidak hanya melibatkan penyampaian informasi tentang kandidat dan program, tetapi juga mencakup edukasi tentang prosedur dan tata cara pemilihan. Temuan bahwa sebagian masyarakat Desa Beringin masih keliru dalam melakukan pemilihan umum menunjukkan adanya gap dalam komunikasi politik, khususnya dalam aspek edukasi procedural. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem komunikasi politik di tingkat lokal belum sepenuhnya efektif dalam menyampaikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses demokrasi yang berkualitas.

Permasalahan ketertiban dalam proses pemungutan suara yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori efektivitas komunikasi politik yang dikemukakan oleh Lasswell (1948). Model komunikasi Lasswell yang terkenal dengan formula "Who says what in which channel to whom with what

effect" menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi politik tidak hanya ditentukan oleh pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh saluran komunikasi yang digunakan dan karakteristik audiens yang menjadi target. Dalam kasus Desa Beringin, meskipun panitia KPU telah berupaya memberikan arahan, namun metode dan saluran komunikasi yang digunakan mungkin belum sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Cangara (2009) menekankan bahwa komunikasi politik yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan karakteristik audiens untuk memastikan pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Solidaritas masyarakat dalam membantu sesama warga yang belum memahami prosedur pemilihan menunjukkan adanya komunikasi interpersonal yang kuat di tingkat grassroots. Menurut teori two-step flow of communication yang dikemukakan oleh Lazarsfeld et al. (1944), informasi politik sering kali tidak langsung diserap oleh masyarakat dari media massa, tetapi melalui opinion leaders atau tokoh-tokoh masyarakat yang berperan sebagai perantara. Dalam konteks Desa Beringin, masyarakat yang lebih memahami prosedur pemilihan berperan sebagai opinion leaders informal yang membantu menyebarkan informasi dan memberikan panduan kepada warga lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelemahan dalam komunikasi formal dari penyelenggara pemilu, jaringan komunikasi informal di tingkat masyarakat dapat menjadi mekanisme kompensasi yang efektif.

c. Faktor-faktor Determinan Pemahaman Politik dalam Perspektif Teori Sosialisasi Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang pemilihan umum dapat dianalisis melalui teori sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1963). Teori ini menjelaskan bahwa sikap dan pemahaman politik seseorang dibentuk melalui proses sosialisasi yang melibatkan berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan media massa. Dalam konteks Desa Beringin, faktor geografis dan aksesibilitas informasi yang terbatas mempengaruhi proses sosialisasi politik masyarakat. Keterbatasan akses terhadap media massa dan informasi politik yang berkualitas menyebabkan proses sosialisasi politik lebih banyak terjadi melalui interaksi sosial informal dan tradisi lokal. Hal ini sejalan dengan argumen Almond dan Verba bahwa dalam masyarakat dengan akses informasi terbatas, sosialisasi politik cenderung lebih parochial dan terfragmentasi, yang dapat menghasilkan pemahaman politik yang tidak komprehensif.

Heterogenitas latar belakang masyarakat Desa Beringin mencerminkan konsep political subculture yang dikemukakan oleh Elazar (1966). Menurut teori ini, dalam suatu wilayah dapat terdapat berbagai subkultur politik yang berbeda berdasarkan latar belakang geografis, etnis, dan pengalaman historis masyarakatnya. Setiap subkultur politik memiliki cara pandang dan interpretasi yang berbeda terhadap konsep demokrasi dan partisipasi politik. Dalam kasus Desa Beringin, masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Minahasa Selatan membawa serta tradisi dan pemahaman politik yang beragam, yang kemudian berinteraksi dan membentuk dinamika politik lokal yang unik. Putnam (1993) dalam studinya tentang civic tradition menekankan bahwa tradisi civic yang dibawa masyarakat dari daerah asal mereka dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di tempat baru mereka bermukim.

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman politik yang ditemukan dalam penelitian ini mendukung teori cognitive mobilization yang dikemukakan oleh Inglehart (1977). Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dan akses informasi dalam masyarakat akan meningkatkan kemampuan kognitif warga negara untuk memahami isu-isu politik yang kompleks dan berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses demokrasi. Dalton (2002) lebih lanjut menjelaskan bahwa cognitive mobilization tidak hanya meningkatkan partisipasi politik, tetapi juga mengubah pola partisipasi dari yang bersifat konvensional menuju bentuk-bentuk partisipasi yang lebih sophisticated dan deliberatif. Dalam konteks Desa Beringin, perbedaan tingkat pendidikan masyarakat menciptakan stratifikasi dalam pemahaman politik, dimana masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih nuanced tentang demokrasi, sementara mereka dengan pendidikan terbatas masih mengandalkan pemahaman yang lebih sederhana dan tradisional.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Beringin tentang pemilihan umum masih bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Meskipun partisipasi fisik dalam pemilihan umum cukup tinggi, pemahaman substantif tentang esensi demokrasi dan mekanisme pemilihan umum masih perlu ditingkatkan. Variasi pemahaman ini tercermin dari definisi demokrasi yang beragam, mulai dari konsep kedaulatan rakyat yang modern hingga interpretasi tradisional yang menekankan musyawarah mufakat. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, heterogenitas latar belakang masyarakat, aksesibilitas informasi, dan pengalaman partisipasi politik terbukti mempengaruhi kualitas pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan program edukasi politik di tingkat lokal. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan pemilihan umum. Program sosialisasi politik perlu mempertimbangkan keberagaman latar belakang masyarakat dan menggunakan saluran komunikasi yang efektif untuk memastikan pesan dapat diterima dengan baik. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pendampingan dan edukasi berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek prosedural pemilihan umum, tetapi juga pada pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas berbagai strategi komunikasi politik dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

E. Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A., & Verba, Sidney. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Creswell, John W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th Edition. Sage Publications.
- Dahl, Robert A. (2020). *On Democracy*. Yale University Press.
- Dalton, Russell J. (2002). *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. Chatham House Publishers.
- Elazar, Daniel J. (1966). *American Federalism: A View from the States*. Thomas Y. Crowell Company.
- Gutmann, Amy. (1987). *Democratic Education*. Princeton University Press.
- Habermas, Jürgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Huntington, Samuel P. (2021). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Inglehart, Ronald. (1977). *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics*. Princeton University Press.
- Lasswell, Harold D. (1948). *The Structure and Function of Communication in Society*. Harper & Row.
- Lazarsfeld, Paul F., Berelson, Bernard, & Gaudet, Hazel. (1944). *The People's Choice*. Columbia University Press.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2019). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 3rd Edition. Sage Publications.
- Neng Latinur Latipah. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Nimmo, Dan. (2004). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Jakarta: Rosdakarya.
- Pateman, Carole. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Patton, Michael Quinn. (2021). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th Edition. Sage Publications.

- Purwanto, Agus. (2024). Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*.
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahman, Abdul. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Demokrasi Lokal*.
- Santoso, Eko, & Wibowo, Ari. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Jawa Barat. *Jurnal Pemerintahan Desa*.
- Schmitter, Philippe C., & Karl, Terry Lynn. (2021). What Democracy Is... and Is Not. *Journal of Democracy*.
- Spradley, James P. (2020). *Participant Observation*. Waveland Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2023). Pemilihan Kepala Desa dan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Wulandari, Sari. (2023). Implementasi Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*.